I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk melihat pembangunan adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menggambarkan bahwa adanya peningkatan aktivitas ekonomi, begitupun sebaliknya. Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konsep pembangunan terdapat makna alokasi sumber daya, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya energi, sumber dana, dan lain-lain (Susetyo, 2011).

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pembangunan diharapkan dapat mempermudah akses publik dalam memperoleh dan menikmati berbagai fasilitas yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, keamanan, serta menjamin ketersediaan infrastruktur yang memadai guna kelangsungan hidup masyarakat. Pembangunan juga diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dengan menurunkan tingkat pengangguran.

Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan infrastruktur juga akan memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial (Pranessy, 2009).

Infrastruktur pembangunan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu: infrastruktur ekonomi, yaitu infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi seluruh prasarana umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, irigasi, perhubungan, air bersih, dan sanitari serta pembuangan limbah, dan infrastruktur sosial yaitu prasarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang terhambat akan membuat pertumbuhan ekonomi terhambat. Kuznet (2009), menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan *public service obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur juga sangat menentukan tingkat keefisienan dan keefektifan kegiatan ekonomi serta merupakan prasyarat agar berputarnya roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur dalam perekonomian sangat penting sebagai pendorong peningkatan produktivitas output dan mobilitas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Bertitik tolak dari pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi serta distribusi hasil pertumbuhan berhubungan dengan infrastruktur, berkembang pendapat bahwa Indonesia sangat tertinggal dalam penyediaan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mencapai sasaran yang diinginkan (Silalahi, 2014).

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur Indonesia Tahun 2009 – 2011

Tahun	Listrik Terjual (ribu MWh)	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan (km)	Air Bersih (juta m3)
2009	134.581,99	476.373	2.313
2010	147.300,49	487.314	2.439
2011	157.992,67	496.607	2.499

Sumber: Statistik Indonesia, 2012

Tabel 1 merupakan kondisi infrastruktur Indonesia periode Tahun 2009 – 2011 yang terdiri dari listrik yang terjual, panjang jalan provinsi, dan air bersih yang disalurkan. Infrastruktur listrik setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada Tahun 2011 listrik yang terjual di Indonesia sebesar 157.992,67 ribu Mwh. Infrastruktur panjang jalan menurut tingkat kewenangan (negara, provinsi, dan kabupaten), selama kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan pada Tahun 2011 panjang jalan sebesar 496.607 Km. Infrastruktur air bersih yang disalurkan di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2011 jumlah air bersih yang disalurkan sebesar 2.499 juta M3. Peningkatan infrastruktur yang dirasa sangat kurang setiap tahunnya di Indonesia akan memberikan dampak pada produktivitas output yang dihasilkan.

Kurang optimalnya infrastruktur di Indonesia, juga dialami di provinsi-provinsi Pulau Sumatera dengan berfluktuasinya data infrastruktur listrik, panjang jalan, dan air bersih dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2013. Salah satu infrastruktur yang menjadi sorotan adalah keberadaan listrik. Listrik merupakan kebutuhan utama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang tumbuh. Listrik selain memenuhi kebutuhan penerangan juga sebagai sumber energi bagi proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat mesin industri.

Tabel 2. Perkembangan Infrastruktur Listrik di Pulau Sumatera Tahun 2005, 2010, dan 2013 (Kwh)

Provinsi	**Listrik yang Terjual (kwh)**		
	2005	**2010**	**2013**
Aceh	701.484.767	1.491.930.000	1.815.029.745
Sumut	4.613.380.000	6.697.290.000	7.917.240.000
Sumbar	1.580.352.000	2.187.249.000	2.712.850.000
Riau	1.224.600.000	2.085.609.000	3.001.566.000
Jambi	525.755.808	685.769.127	955.660.000
Sumatera Selatan	1.621.564.627	2.739.948.818	4.162.090.000
Bengkulu	246.861.730	444.564.094	641.513.202
Lampung	1.380.594.734	2.259.460.000	3.182.210.000
Kep. Babel	269.417.000	436.760.000	802.349.667
Kep. Riau	642.877.000	1.887.200.000	2.421.920.000

Sumber: Statistik Listrik, 2013

Tabel 2 menunjukkan perkembangan infrastruktur listrik provinsi di Pulau Sumatera. Listrik yang terjual pada selama periode Tahun 2005, 2010, dan 2013 di 10 provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan yang signifikan, rata-rata listrik yang terjual Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,24%. Tahun 2013 konsumsi listrik yang terbesar berada di Provinsi Sumatera Utara sebesar 7.917.240.000 Kwh dan konsumsi listrik terendah berada di Provinsi Bengkulu sebesar 641.513.202.

Penggunaan listrik sebagai sumber energi bagi kegiatan industri dan lainnya terus meningkat, sehingga konsumsi listrik yang terjual mengalami peningkatan. Penggunaan listrik yang terus meningkat belum diikuti oleh penggunaan sumber energi listrik alternatif seperti panas bumi (Bappenas, 2013).

Tabel 3. Perkembangan Infrastruktur Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan di Pulau Sumatera Tahun 2005, 2010, dan 2013 (Km)

Provinsi	**Jalan (km)**		
	2005	**2010**	**2013**
Aceh	9.194,27	9.611,86	11.532,18
Sumatera Utara	14.778,89	16.767,41	18.074,34
Sumatera Barat	9.001,02	9.401,36	10.263,41
Riau	9.963,86	12.016,66	12.444,80
Jambi	4.863,57	5.558,82	6.318,95
Sumatera Selatan	9.456,91	8.594,73	8.839,50
Bengkulu	3.108,68	3.977,27	4.426,84
Lampung	5.865,39	9.339,20	9.872,11
Kep. Babel	1.880,43	2.674,91	2.822,80
Kep. Riau	1.982,43	2.294,73	2.574,23

Sumber: Statistik Transportasi, 2013

Infrastruktur panjang jalan provinsi menurut tingkat kewenangan dan kondisi jalan, setiap tahunnya di setiap provinsi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 panjang jalan di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dalam periode 1 tahun yaitu Tahun 2010 panjang jalan sebesar 8.594,73 Km dari tahun sebelumnya pada Tahun 2005 sebesar 9.456,91 Km. Provinsi Sumatera Utara memiliki panjang jalan sebesar 18.074,36 Km, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau memiliki panjang jalan sebesar 2.574,23 Km. Infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian yang menghubungkan kegiatan ekonomi antar wilayah sehingga distribusi barang dan jasa dapat bergerak dengan lancar (Taryono dan Ekwarso, 2013).

Pentingnya pembangunan jalan akan mempermudah akses kemajuan suatu daerah. Dengan jalan yang baik, proses distribusi barang dan jasa akan mudah dilakukan. Keberadaan jalan dengan sendirinya akan menghidupkan berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah. Sehingga pembangunan jalan yang baik akan membuka peluang bagi kemajuan dan tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Tabel 4. Perkembangan Infrastruktur Air Bersih di Pulau Sumatera Tahun 2005, 2010, dan 2013 (Ribu M3)

Provinsi	**Air Bersih yang Disalurkan (Ribu m3)**		
	2005	**2010**	**2013**
Aceh	14.004	49.379	18.752
Sumut	163.177	199.545	232.517
Sumbar	37.947	46.147	156.128
Riau	11.039	16.378	15.757
Jambi	21.035	22.330	23.213
Sumsel	41.131	23.510	113.494
Bengkulu	11.754	13.299	14.473
Lampung	10.850	13.467	14.798
Kep. Babel	2.507	3.360	4.050
Kep. Riau	38.882	51.656	73.920

Sumber: Statistik Air Bersih, 2013

Tabel 4 menunjukkan data air bersih yang disalurkan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan yang signifikan terkecuali pada Provinsi Riau air bersih yang disalurkan mengalami penurunan pada Tahun 2013 menjadi 15.757 ribu m3. Air bersih menjadi infrastruktur yang penting sebagai penopang pembangunan. Air bersih menjadi intrumen penting bagi kebutuhan konsumsi, rumah tangga, fasilitas umum, maupun industri. Sehingga penyediaan air bersih bagi masyarakat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas output ekonomi.

Infrastruktur sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, untuk mencapai proses tersebut dibutuhkan kerja keras agar infrastruktur dapat meningkat setiap tahunnya. Kondisi perekonomian yang baik pada suatu wilayah dilihat dari pendapatan nasional atau regionalnya. Jika PDRB selalu turun setiap tahunnya maka pembangunan di suatu wilayah tersebut akan turun, begitupun sebaliknya. Tidak hanya itu, perekonomian suatu wilayah tersebut akan turun dan akibatnya adalah pendapatan nasional yang semakin menurun setiap tahunnya serta pengangguran akan semakin bertambah, dan juga tingkat kemiskinan yang akan bertambah. Tingkat kemiskinan yang bertambah menyebabkan kriminalitas pun semakin bertambah.

Beberapa ekonom mengemukakan pendapat mengenai hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, Hirchman (1958) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi. Todaro (2006) juga mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting yang menentukan pembangunan ekonomi.

Peningkatan pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, perhubungan dan perumahan di seluruh Indonesia dilakukan alah satunya untuk mengatasi gelombang pengangguran. Selain akan menyerap tenaga kerja, proyek infrastruktur juga akan membuat perekonomian bergerak.
Pembangunan ekonomi di Indonesia menjadikan infrastruktur sebagai tumpuan dalam bergeraknya pembangunan sehingga dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur pada setiap tahunnya terus meningkat.

Infrastruktur merupakan investasi atau modal suatu daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pembangunan yang tidak merata pada setiap daerah akan mempengaruhi nilai PDRB di setiap daerah tersebut. Diantara wilayah-wilayah di Indonesia, Pulau Jawa menjadi daerah yang mendominasi pembangunan, dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia.

Tabel 5. Distribusi PDRB Per Pulau di Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2011 (Persen)

Pulau	**Tahun**		
	2009	**2010**	**2011**
Sumatera	22,69	23,12	23,57
Jawa	58,58	58,05	57,60
Bali, NTB, NTT	2,76	2,73	2,56
Kalimantan	9,22	9,15	9,54
Sulawesi	4,46	4,53	4,60
Maluku, Papua	2,29	2,42	2,13

Sumber: Statistik Indonesia 2012

Tabel 5 menunjukkan data distribusi PDRB di Indonesia, daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDB Indonesia adalah wilayah Pulau Jawa. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa wilayah Pulau Jawa memberikan sumbangan terbesar terhadap PDB Indonesia salah satunya adalah Ibukota Indonesia berada di Pulau Jawa sehingga pusat pemerintahan maupun perekonomian berpusat di Pulau Jawa. Penelitian hubungan pengaruh infrastruktur terhadap PDRB telah banyak dilakukan sebelumnya di berbagai provinsi di Indonesia, penelitian ini ingin menganalisis bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap PDRB di 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Pemilihan Pulau Sumatera sebagai lokasi penelitian karena Pulau Sumatera memberikan kontribusi terbesar nomor dua setelah Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia sebesar 23,57% pada Tahun 2011. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh infrastruktur terhadap PDRB di Pulau Sumatera belum banyak dilakukan, sehingga menjadi hal yang menarik untuk membahas tentang pengaruh infrastruktur terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini juga menggunakan seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Selain modal fisik, faktor tenaga kerja menjadi kunci utama dalam peningkatan PDRB. Tenaga kerja sebagai input yang menjalankan semua faktor produksi. Dengan peningkatan tenaga kerja diharapkan PDRB akan meningkat dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Todaro (2006) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Setiap kegiatan produksi yang akan dilaksanakan pasti akan memerlukan tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi (J. Simanjuntak, 1995).

Tabel 6. Perkembangan Tenaga Kerja di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2005, 2009, dan 2013 (Jiwa)

Provinsi	2005	2009	2013
Aceh	1.455.968	1.732.561	1.824.586
Sumatera Utara	5.166.132	5.765.643	5.899.560
Sumatera Barat	1.717.289	1.998.922	2.005.625
Riau	2.222.927	2.067.357	2.479.493
Jambi	1.113.150	1.260.592	1.382.471
Sumatera Selatan	3.021.021	3.196.894	3.464.620
Bengkulu	729.552	821.706	801.146
Lampung	3.100.608	3.387.175	3.471.602
Kepulauan Bangka Belitung	446.174	506.284	596.786
Kepulauan Riau	496.087	626.456	900.757

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Indonesia, 2013

Tabel 6 menunjukkan bahwa setiap tahunnya tenaga kerja yang bekerja di Pulau Sumatera meningkat. Peningkatan tenaga kerja pada Tahun 2013 tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada Tahun 2013. Peningkatan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera dan Nasional ditunjukkan pada gambar berikut ini:

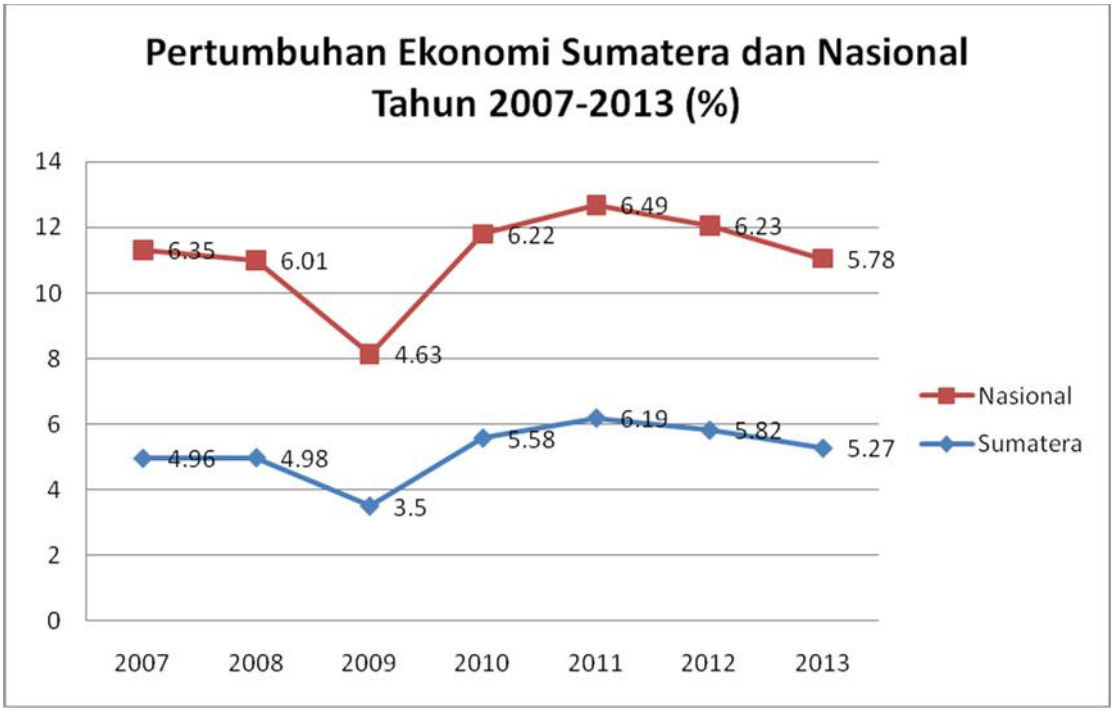

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera dan Nasional Tahun 2007-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Pada Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumatera dalam 3 tahun terakhir Tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami penurunan. Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 6,19% dan turun menjadi 5,82% pada Tahun 2012, dan Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,27%. Kondisi ini sama dialami oleh pertumbuhan ekonomi Nasional, dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2011 sebesar 6,49%, turun menjadi 6,23% pada Tahun 2012 dan mengalami penurunan pada Tahun 2013 sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada periode Tahun 2007 – 20013 masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan infrastruktur pendukung seperti listrik, jalan, pelabuhan, bandara, air, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pulau Sumatera seperti geothermal, migas, batubara, dan lain-lain maka diharapkan infrastruktur dapat berkembang dengan pesat. Disamping itu, luas pulau Sumatera yang besar dan dengan jumlah penduduk yang cukup diharapkan pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik.

Sampai saat ini berbagai pendapat mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada penelitian masing-masing. Pendapat pertama mengatakan bahwa pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif (Ratner, (1983), Aschauer (1989), Lynde (1992), Lau dan Smith (1997), dan Sanchez-Robles (1998)). Pendapat kedua yang mengatakan bahwa pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan bahkan negatif (TOM (1991) dan Holtz-Eakin (1994)).

Penelitian tentang pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Prasetyo dan Firdaus (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, waktu penelitian, dan variabel yang mempengaruhi PDRB di wilayah Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan periode Tahun 2009 sampai 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur listrik terhadap PDRB Provinsi di Pulau Sumatera dan seberapa besarkah kontribusinya?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap PDRB Provinsi di Pulau Sumatera dan seberapa besarkah kontribusinya?
3. Bagaimana pengaruh infrastruktur air terhadap PDRB Provinsi di Pulau Sumatera dan seberapa besarkah kontribusinya?
4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi di Pulau Sumatera dan seberapa besarkah kontribusinya?
5. Bagaimana pengaruh infrastruktur listrik, jalan, air, dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur listrik dan kontribusinya terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan dan kontribusinya terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.
3. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur air dan kontribusinya terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.

4. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.
5. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur listrik, jalan, air, dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
2. Meningkatkan pengembangan dan pengetahuan khususnya mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
3. Sebagai masukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang tertarik membahas masalah ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan fungsi dasar produksi *Cobb-Douglas.* Skemanya adalah sebagai berikut :

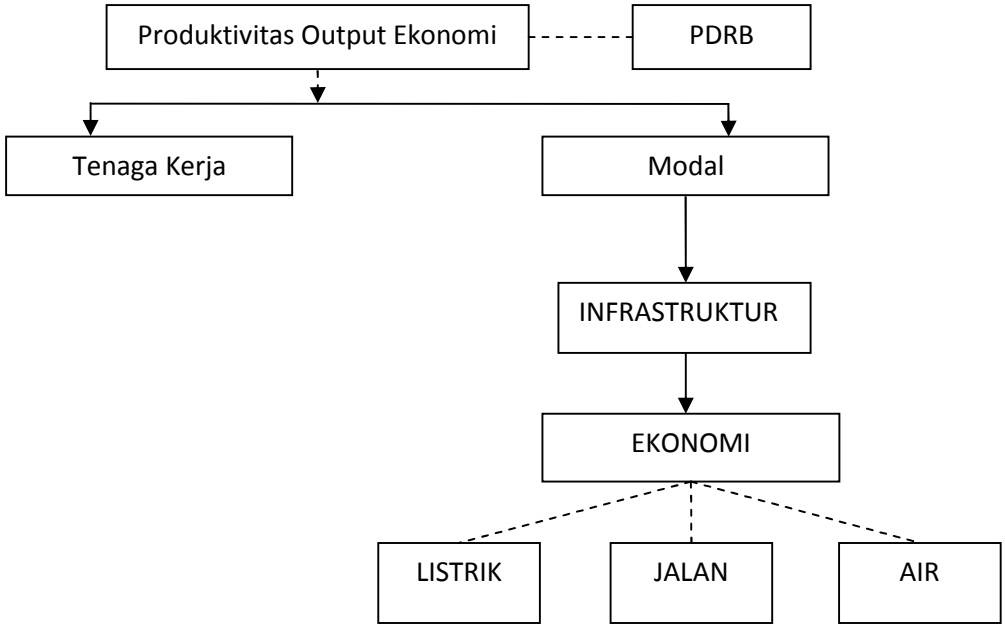

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Produktivitas output yang digambarkan melalui PDRB dipengaruhi oleh dua faktor yaitu modal dan tenaga kerja. Modal untuk meningkatkan PDRB adalah infrastruktur sebagai modal fisik. Infrastruktur yang memadai, akan menunjang majunya suatu daerah. Fungsi produksi *Cobb-Douglas* menjelaskan bahwa produktivitas output dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja dan modal. Setiap peningkatan tenaga kerja dan modal maka akan mempengaruhi perubahan pada tingkat produktivitas output yang dihasilkan (Syahputri, 2013). Infrastruktur ekonomi dibagi menjadi tiga fokus utama yaitu listrik, jalan, dan air (Maqin, 2011).

Beberapa argumentasi mengenai pengaruh infrastruktur dalam peningkatan PDRB, antara lain: (1) Penelitian tentang Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Lisa Pranessy, dkk

menyimpulkan bahwa infrastruktur listrik berpengaruh positif terhadap PDRB, tetapi panjang jalan dan air bersih tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (2) Penelitian tentang Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat yang dilakukan oleh Abdul Maqin menyimpulkan bahwa infrastruktur listrik, tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk infrastruktur jalan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Fokus pada penelitian ini adalah melihat bagaimana infrastruktur ekonomi dan tenaga kerja mempengaruhi produktivitas output yang digambarkan melalui PDRB.

F. Hipotesis

1. Diduga infrastruktur listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.
2. Diduga infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.
3. Diduga infrastruktur air berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.
4. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.
5. Diduga secara bersama-sama infrastruktur listrik, jalan, air dan tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB provinsi di Pulau Sumatera.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

BAB I : Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka berisi landasan teori, tujuan teoritis, dam tujuan empiris yang relevan dalam penulisan penelitian ini.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari tahapan penelitian, sumber data, batasan perubah variabel dan metode analisis.

BAB IV : Hasil dan pembahasan yang memuat hasil olah data serta pembahasan dari hasil hitung statistik.

BAB V : Kesimpulan dan saran, yang memuat kesimpulan dari seluruh kegiatan penelitian serta saran untuk pengembangan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN